

**EFEKTIVITAS KERJA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)  
DALAM MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN  
MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

**B I S M A N**

NIM. 10100111015

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Bisman, NIM :10100111015, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar,      Maret 2015

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag**  
**NIP: 19640601 199303 1 003**

**A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag**  
**NIP: 19720719 200003 2 002**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Bisman  
NIM : 10100111015  
Tempat/Tgl. Lahir : Simbuang II, 10 November 1992  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Perm. Patri Abdullah D1/16 Samata Gowa.  
Judul :Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan  
Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya  
Perceraian di Kecamatan Makassar.

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Maret 2015

Penyusun,

**BISMAN**

NIM: 10100111015

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Kerja Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar”, yang disusun oleh Bisman, NIM: 10100111015, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2015 M, bertepatan dengan 19 Rabiul awwal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Maret 2015 M.  
19 Jumadil awal 1436 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA	(	)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag	(	)
Munaqisy I	: Dra. Hj. Hartini Tahir, M. H.I	(	)
Munaqisy II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag	(	)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(	)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag	(	)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA  
NIP. 19570414 198603 1 003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar”, yang disusun oleh Bisman, NIM: 10100111015, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2015 M, bertepatan dengan 19 Jumadil awal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Februari 2015 M.  
19 Jumadil awal 1436 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA	(	)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Halim Talli, M.Ag	(	)
Munaqisy I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M. Ag	(	)
Munaqisy II	: Dra. Hj. Hartini Tahir, M. H.I	(	)
Pembimbing I	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(	)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag	(	)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA  
NIP. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas kerja BP4 dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar”, dapat terselesaikan.

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satumasa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA., selaku PGS Rektor UIN Alauddin Makassar, serta Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS. selaku mantan Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta para dosen fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. Abd Halim Talli, M.Ag, dan Ibu A. Intan Cahyani S.Ag. M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Peradilan Agama yang telah banyak

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi, serta K'Sri selaku Staf Jurusan.

4. Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag. dan Ibu A.Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak mengarahkan dalam perampungan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tuaku, dan saudaraku yang membesarkan, mendidik, menyekolahkanku hingga pendidikan tinggi, serta doa dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam menapaki jenjang pendidikan sampai menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Camat, para pegawai Kantor Kecamatan Makassar, Kepala KUA Kecamatan Makassar Bapak Drs. Syamsuddin, dan para pegawai KUA Kecamatan Makassar beserta Masyarakat Kecamatan Makassar Kota Makassar yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi informan, serta banyak membantu kelancaran penelitian
7. Teman-teman Komunitas Rahman Subhan, Muhammad Fathul Muin, Ibnu Izzah, Ibnu Hamdun yang saling melengkapi, membantu dalam perampungan skripsi
8. Teman-temanku tercinta, Samiun Rusman, Nurwahida, Muh. Farid, Muh. Wahid, yang telah banyak menemani mengarungi bahtera kehidupan kampus yang berliku-liku dan dengan segala suka dukanya.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2011 baik dari Peradilan Agama maupun jurusan lainnya yang bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar. Tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. \

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun, senantiasa diharapkan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang diberikan. Akhirnya semoga skripsi ini member manfaat bagi semua pembaca. Amin

Makassar, 10 Maret 2015





## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1-10
A Latar Belakang Masalah .....	1
B Rumusan Masalah .....	7
C Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
D Kajian Pustaka .....	8
E Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
 BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	 11-50
A Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan .....	11
B Perkawinan .....	13
1. Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan .....	13
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	27
3. Prinsip Pernikahan dalam yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan .....	34
4. Hak dan Kewajiban Suami – Istri .....	39
C Perceraian.....	43
D Kerangka Konseptual .....	49
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	 51-60
A Jenis dan Lokasi Penelitian.....	51
B Pendekatan Penelitian .....	54
C Sumber Data .....	54
D Metode Pengumpulan Data .....	55
E Instrumen Penelitian .....	56
F Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN .....	61-85
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
B. Faktor pendukung maupun penghambat bagi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar .....	71
C. Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar .....	80
D. Analisis Penulis .....	82
BAB V PENUTUP.....	85-89
A Kesimpulan .....	85
B Implikasi Penelitian .....	88
DAFTAR PUSTAKA . ....	90-91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Makassar .....	61
Tabel. 2 Daftar Staf Pegawai KUA Kecamatan Makassar .....	65
Tabel. 3 Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar .....	70
Tabel. 4 Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Makassar Kota Makassar...	71



## DAFTAR SINGKATAN

as	: ‘alaihi salam
BP4	: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
HR	: Hadits Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUA	: Kantor Urusan Agama
Q.S	: Qur’an Surat
RA	: Radiallahu ‘anhu
RI	: Republik Indonesia
saw	: Sallallahu ‘alaihi wa sallam
swt	: Subhanahu wa ta’ala
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan



## DAFTAR TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ا...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

#### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).



## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Nama : **Bisman**  
NIM : 10100111015  
Judul : Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar.

---

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki peran yang tidak mudah di masa ini. Tingginya persoalan perkawinan merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Tetapi banyak yang menilai tugas ini kurang maksimal dilakukan oleh BP4. Karena itulah penting untuk mengetahui permasalahan, (1) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar? dan (2). Apa faktor pendukung maupun penghambat bagi BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar ?

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai peran dan fungsi BP4 mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari tiga langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; *pertama*, faktor pendukung BP4 di Kecamatan Makassar adalah sebagai lembaga semi resmi dan mendapatkan dukungan sosial. Sementara itu, faktor penghambat BP4 adalah kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang kurang, SDM yang kurang mumpuni. *Kedua* peranan BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar belum maksimal. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam peran-peran, BP4 terhadap Kursus Pra Nikah untuk persiapan rumah tangga membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga. Sehingga dengan langkah ini BP4 di Kecamatan Makassar selalu mencoba seoptimal mungkin guna meraih solusi yang terbaik (*win win solution*) dalam setiap problem pernikahan yang dialami oleh masyarakat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.<sup>2</sup>

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Cet. Ke 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 6.

<sup>2</sup>Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011), h. 3.

<sup>3</sup>Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014, h. 4

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk Kursus Pra Nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.<sup>4</sup>

Kursus Pra Nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 5.

<sup>5</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 2.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapat pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 Jakarta 15 - 16 Agustus 2014 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual. Maka diadakan program Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah ini mempunyai tujuan sebagaimana yang telah tercantum pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan adanya Program Kursus Pra Nikah ini adalah :

Dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga<sup>7</sup>.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa:

Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 67.

<sup>7</sup>Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, h. 2.

Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah swt. tapi faktanya masih banyak kasus perceraian yang terjadi di masyarakat.

Tingginya permintaan gugat cerai isteri terhadap suami tersebut, diduga karena kaum perempuan merasa mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, atau akibat globalisasi sekarang ini, atau kaum perempuan sudah kebablasan. Kesadaran atau kebablasan, itulah antara lain yang menjadi perhatian kita semua sebagai umat beragama.

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Terbentuknya keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan itu haruslah diikaui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum /30: 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya-

---

<sup>8</sup> Peraturan Mentri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan Perkawinan bagi yang bergama Islam, h. 8.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>9</sup>

Tujuan perkawinan sesuai firman Allah swt adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai, sejahtera, dan bahagia di kenal dengan sebutan keluarga sakinah, mawaddah warrahmah.

Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena keluarga dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga. Tanpa didahului perkawinan dua orang laki-laki dan perempuan tinggal di suatu rumah belum berhak disebut sebagai keluarga.

Setiap perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti putusnya perkawinan hanya di sebabkan oleh suatu kematian sesuai kehendak tuhan, bukan oleh sebab lain. Jika kemudian timbul suatu perselisihan tersebut di usahakan agar dapat diatasi.

Usaha menanggulangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang di tempuh oleh pasangan suami isteri yang dilanda krisis untuk mennyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang di selesaikan sendiri oleh mereka dan ada pula yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang ini dikenal dengan nama Badan Penasehatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan cara media lainnya.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 406.



Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah salah satu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam.

Selanjutnya untuk mewujudkan rumah tangga yang damai dan bahagia menurut ajaran agama Islam diperlukan bimbingan/Kursus Pra Nikah yang terus menerus, baik secara langsung ataupun tidak dan dari orang lain yang berkompeten atau dari lembaga seperti BP4 atau sejenis. Sebagai lembaga yang berkompeten, BP4 sudah sejak lama ada di Indonesia.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimanakah tingkat efektivitas kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar?”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu:

1. Apa faktor pendukung maupun penghambat Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar ?

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

#### **1. Fokus Penelitian**

Agar menghindari kekeliruan penafsiran terhadap pengertian yang sebenarnya, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini:

Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai akibat, pengaruh, kesannya<sup>10</sup>.

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah<sup>11</sup>.

Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang sebagai suami isteri.

#### **2. Deskripsi Fokus**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar selama satu bulan lebih yaitu dari tanggal 5 Januari sampai 10 Februari 2015 melalui wawancara langsung kepada para pegawai BP4 dan masyarakat tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap penting.

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 510.

<sup>11</sup> Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014, h. 5.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap posisi penelitian ini, di antara karya-karya yang ada, berikut ini akan penulis ilustrasikan tentang penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu sebagai berikut:

Dalam skripsi yang disusun oleh Mayzan Arif Harsanto dengan Judul “Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede’ Yogyakarta Tahun 2007-2009)”. Dalam penelitaannya menitik beratkan keutuhan rumah tangga.<sup>12</sup>

Dalam skripsi lain disusun oleh Sujiantoko dengan Judul “Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara”. Dalam penelitaian tersebut menitik beratkan pada mediasi persoalan pernikahan.<sup>13</sup>

Dalam skripsi lain disusun oleh Syarifuddin dengan Judul “Peran Dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat”. Dalam penelitaian tersebut menitik beratkan pada pembentukan keluarga sakinah.<sup>14</sup>

Berdasarkan contoh dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusun kemudian mencoba mengangkat masalah yang ditimbulkan dari kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan

---

<sup>12</sup>Mayzan Arif Harsanto, “*Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede’ Yogyakarta Tahun 2007-2009)*”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009)

<sup>13</sup>Sujiantoko, “*Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010)

<sup>14</sup>Syarifuddin, “*Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*”, Skripsi (Jakarta : Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

berumah tangga. Sehingga sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapapun dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Dengan demikian, tulisan ini disamping dapat dipertanggungjawabkan obyektivitasnya juga diharapkan menjadi cakrawala baru dalam kajian tentang Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Kursus Pra Nikah di Kecamatan Makassar dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi BP4 dalam mencegah terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar pada program Kursus Pra Nikah ini.
- b. Ingin mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BP4 di Kecamatan Makassar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kursus Pra Nikah guna mengurangi terjadinya perceraian.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BP4 Kota Makassar secara umum dan secara khusus pada BP4 di Kecamatan Makassar dalam meningkatkan mutu dan kualitas Pernikahan, agar dapat lebih memahami arti keluarga sakinah yang sesungguhnya sebelum mereka resmi menjalankan sebuah rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan adalah agar kelak menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah sesuai dengan ajaran agama Islam guna mencapai kebahagiaan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian pernikahan (BP4)*

BP4 ialah lembaga yang mengatur tentang bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. BP4 Merupakan badan resmi yang diakui oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama No 3 Tahun 1977, dan berkedudukan di bawah Kantor Urusan Agama.

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan perkawinan.

Dijelaskan pula bahwa tugas BP4 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2014 yang dipimpin oleh Ketua sidang Drs. H. Najib Anwar, MH. dan Sekretaris Sidang Dra. Hj. Nilmayetty, MM. adalah menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

BP4 dalam meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil MUNAS Ke XV tanggal 15 – 16 Agustus 2014, h. 4.

Bahwa BP4 sebagai lembaga penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawianan adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa salah satu tugas BP4 ialah menyelenggarakan kursus calon pengantin atau yang biasa kita kenal sekarang dengan istilah Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah tersebut bukan hanya untuk calon pengantin saja melainkan untuk orang yang sudah masuk usia nikah seperti siswa SMA sudah perlu untuk diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dikemudian hari.

Kursus Pra Nikah tercantum di dalam Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>16</sup>

Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjelaskan bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi terjadinya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>16</sup>Peraturan Direktoral Jenderal Bimbin Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, h. 2.

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa Kusus Pra Nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pengantin guna mengurangi terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil MUNAS BP4 ke XV/2014 di Jakarta tanggal 15 -16 Agustus 2014 yang dipimpin oleh Ketua Sidang Bapak Drs. H. Najib Anwar, MH dan Sekertaris sidang Dra. Hj. Nilmayetty, MM, seperti yang di jelaskan pada pasal 1 bahwa BP4 adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan pada Pasal 6 salah satu upaya dan usaha BP4 adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.

## **B. Perkawinan**

### **1. Pengertian dan Landasan Hukum Perkawinan**

Dalam Islam melakukan perkawinan merupakan perintah agama kepada orang yang mampu melaksanakannya. Selain itu perkawinan dinilai tidak hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu pengenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>17</sup> Sehingga Rasulullah saw memerintahkan bagi orang-orang yang memiliki kesanggupan agar hidup berumah tangga yang ditandai dengan pernikahan. Beberapa hal yang berpengaruh dalam memberikan arti dari nikah diantaranya: Sistem hukum, keyakinan atau bisa juga karena unsur-unsur yang

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.7.

hendak digunakan dalam perumusan tentang nikah. Misalnya perbedaan konsep nikah dalam hukum perdata, agama non Islam dengan konsep nikah menurut hukum Islam.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi.<sup>19</sup> Sedangkan menurut istilah *syara'* terdapat beberapa definisi, diantaranya: Perkawinan menurut *syara'* yaitu *akad* yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>20</sup> Perkawinan ialah *akad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.<sup>21</sup>

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu *akad* yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan

---

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2003), h. 8.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 8.

<sup>21</sup>Zakiah Daradjat, “*Ilmu Fiqih*,” dalam Abdul Rahman Ghazali, “*Fiqh Munakahat*,” (Cet.3; Jakarta : Kencana, 2003), h. 8.



memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>22</sup>

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut secara syar’i.<sup>23</sup>

Dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha atau zawaja*”.<sup>24</sup>

Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari *akad* itu bila di hubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum *akad* tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>25</sup>

Ada juga beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.

Pernikahan, seperti halnya perjanjian lain, dapat dipahami oleh hak dan kewajiban yang diciptakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam terminologi Islam, terdapat rujukan seperti *ahkam al-zawaj*, konsekuensi hukum

---

<sup>22</sup>Zakiah Daradjat, “Ilmu Fiqih,” dalam Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat”, h. 8.

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 37.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* , h. 37.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* , h. 37.

perjanjian pernikahan. Dengan pernikahan, seorang perempuan berada di bawah isma suaminya. Isma dapat diterjemahkan sebagai otoritas, kontrol dan perlindungan, ini menghasilkan beberapa hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak, beberapa diantaranya merupakan hal-hal yang lain merupakan hukuman.<sup>26</sup>

Perkawinan menjadi salah satu siklus yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dan lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini.<sup>27</sup>

Menurut hukum perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalididzan*, untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Menikah atau melangsungkan suatu perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus dilaksanakan pada jalan yang benar agar tidak menyimpang dari aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam menimbulkan

---

<sup>26</sup>Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab* (Pondok Indah: ICIP, 2005), h. 18.

<sup>27</sup>Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* (Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011), h. 3.

<sup>28</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Edisi I. (Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69.

<sup>29</sup>A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al Bayan, 1994), h. 21.

malapetaka bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan, laki-laki membutuhkan seorang perempuan sebagai pasangannya, dan perempuan membutuhkan seorang laki-laki sebagai pelindungnya, yang demikian ini merupakan hukum alam.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawddah warrahmah.<sup>30</sup>

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah swt.<sup>31</sup>

Maka dari itu BP4 hadir ditengah-tengah masyarakat guna mencapai tujuan mempertinggi mutu perkawinan. BP4 merupakan lembaga yang menangani hal-hal penasehatan, pelestarian dan pelestarian perkawinan, guna mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Landasan hukum BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4 yaitu QS. Ar-Ruum/30: 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

<sup>30</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang. No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 228.

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006), h. 1.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>32</sup>

Ayat diatas merupakan sebagai landasan hukum BP4, adapun kesimpulan atau inti sari yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah:

Pertama, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga (rumah tangga) dimana Allah swt menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan, Allah swt menumbuhkan ketemtraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ketemtraman dan kasih sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan.

Kedua, untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, diperlukan bimbingan secara terus menerus tanpa henti. Dalam hal ini para konsultan penasihat perkawinan di BP4.

Ketiga, perlu adanya konsultan penasihat perkawinan yang berbudi pekerti luhur, berakhlak baik, berhati nurani yang bersih dan santun. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sehingga kerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah bisa efektif di masyarakat.

Pada prinsipnya perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami dan isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>33</sup>

Dari pemaparan diatas merupakan motivasi daripada landasan hukum BP4, oleh karena itu, diharapkan BP4 dalam setiap melaksanakan tugasnya harus

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya*, h. 406.

<sup>33</sup>Ahmad. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 268.

menjiwai dan menghayati ketiga motivasi diatas dan memberi pengarahan dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi dengan sejumlah ketentuan. Sehingga diharapkan keteraturan dan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas BP4 itu bisa berjalan lebih baik kedepannya. Dengan demikian diharapkan efektivitas BP4 dalam memberikan bimbingan dan pengajaran sesuai pada sasaran guna mencapai cita-cita keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

Pernikahan adalah merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, firman Allah swt. dalam Q.S An-Nisa/04: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembak biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>34</sup>

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya*, h. 406.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan (perkawinan) dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

**Pasal 2**

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>35</sup>

**Pasal 3**

Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>36</sup>

Serta menurut UU No.1 Tahun 1974 bahwa yang di maksud pernikahan adalah :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Apabila definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

a) Ikatan lahir batin.

Pertimbangan pernikahan tidak hanya pada kepentingan lahiriyahnya tetapi juga pada batiniyahnya.

b) Antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pernikahan hanya boleh dilakukan antara lawan jenis dan tidak mengenal pernikahan sesama jenis.

---

<sup>35</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Aqademika Prasindo, 2010), h. 114.

<sup>36</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 114.

<sup>37</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* , h. 2.

c) Sebagai suami isteri.

Pernikahan sebagai dasar akan sah atau tidaknya hubungan antara pria dan wanita yang disebut dengan pasangan suami isteri

d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan sila pertama dalam pancasila, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga pertimbangan pernikahan tidak hanya pada unsur batin.

Dari rumusan pasal 1 Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Sedangkan hukum nikah<sup>38</sup> ada 5, yaitu :

1) Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar serta percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan

---

<sup>38</sup>Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat Khitab, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2009), h. 44-48.

dalam pergaulan isteri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّ وَجْهَ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.

Pada saat seperti di atas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman. Meninggalkan zina adalah fardu dan caranya yaitu menikah tidak mengurangi hak seseorang maka ia menjadi wajib. Menurut kaidah ulama ushul: "Sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakannya, maka ia hukumnya fardu juga". Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.

## 2) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhani*) dan



dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

### 3) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melanggar hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka rmenikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah diladikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

### 4) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradikti, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat

akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi fardu dan wajib menikah. Di sisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti isterinya jika ia menikah. Dalam hal ini, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Apakah sisi keharaman nikah yang lebih kuat atau sisi fardu dan wajib nikah?

Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli isteri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah. Hak hamba di dahulukan jika bertentangan dengan hak Allah murni. Kami maksudkan di sini, bahwa jika seseorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli isteri dengan buruk jika menikah. Di sini terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap isteri.

Analisis di atas lebih kuat arena maksiat penganiayaan tidak ada obat atau jalan untuk mencari keselamatan. Sedangkan meyakini akan terjadinya perselingkuhan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobatinya seperti petunjuk Nabi saw dalam hadisnya tentang perintah menikah bagi orang yang ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan, diperintahkan berpuasa. Dalam kondisi seperti ini, seseorang diperintahkan berpuasa agar menjadi terapi baginya, di mana berpuasa dapat mematahkan syahwat. Dikarenakan dengan lapar ini keringat menjadi kering, darah menjadi minim, dan kecintaan seksual menjadi berkurang. Nabi saw bersabda: Sesungguhnya setan berjalan bersama aliran lapar. Tidak ada asumsi

bahwa diperbolehkan berzina bagi seseorang dalam kondisi seperti di atas dan hal ini tidak mungkin pernah terlintas dalam hati seorang ahli syariah. Hal tersebut dimaksudkan mencegah kejahatannya terhadap isteri dan melemahkannya agar memelihara dirinya dengan cara berpuasa sebagaimana sabda Nabi saw bahwa berpuasa itu sebagai perisai baginya dan lain-lain.

#### 5) Fardu, *Mandub* dan *Mubah*

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap isteri. Menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan:

Pertama, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadis mengenai perintah nikah seperti firman Allah swt dalam Q.S An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>39</sup>

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.<sup>39</sup>

Maksudnya dari ayat diatas adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Dan hadits Nabi saw: Wahai para pemuda, siapa yang marnpu di antara kalian akan biyanikah, hendnklah menikah.

Allah swt dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi saw dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya. Andaikata *mandub* atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya*, h. 354.

Kedua, Nabi saw melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadits shahih Al-Bukhari dan Muslim: Bahwa ada tiga golongan datang ke rumah para isteri Nabi saw seraya bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diberitahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata: “Dimana posisi kita dari Nabi saw padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang?” salah satu di antara mereka berkata: “Adapun aku sungguh akan menjalankan shalat malam selamanya”. Berkata yang lain: "Saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka". Dan berkata yang lain: "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya". Datanglah Rasulullah saw dan bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لِكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

Kalian yang berkata begini dan begini. Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang paling taqwa kepada-Nya, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat, tidur dan mengawini beberapa isteri. Barangsiapa yang benci sunnahku maka tidak tergolong mengikuti petunjukku.

Dalam hadits di atas Rasulullah dan menolak kemauan sebagian sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw melarang membujang. Larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib (menikah). Dalil inilah yang menunjukkan kewajiban menikah.

Ketiga, seseorang, walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya dan memeliharanya dengan menikah. Nikah ini dituntut dengan tuntutan yang kuat seperti melihat aurat wanita lain hukumnya haram, karena terkadang mendatangkan perbuatan zina dan mendorong nafsu untuk mencarinya. Dalam hal ini hukumnya sama, yaitu fardu atau wajib.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan yang mesti diperhatikan adalah rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>40</sup>

Adapun rukun pernikahan tersebut, juga terdapat berbagai pandangan, diantaranya :

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Adanya shighot akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>41</sup>

Pendapat lain tentang Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan,

---

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

<sup>41</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *fiqh munakahat I* (Cet.1; Bandung: CV. Pustaka setia,1999), h.64

“*Zawwajtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah”) atau “*Ankahtuka Fulanah*” (“Aku nikahkan engkau dengan Fulanah”).

- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, “*Qabiltu Hadzan Nikah*” atau “*Qabiltu Hadzat Tazwij*” (Aku terima pernikahan ini) atau “*Qabiltuha*.”

Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz *nikah* dan *tazwij* karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur`an. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S al-Ahzab/33:37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا

Terjemahnya:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikannya), zawwajnakaha (Kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah diceraikan Zaid).<sup>42</sup>

Dan firman-Nya Q.S al-Nisa/04:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>43</sup>

Lafadz *tazwij* dan lafadz *nikah*. Namun penyebutan dua lafadz ini dalam Al-Qur`an bukanlah sebagai pembatasan, yakni harus memakai lafadz ini dan tidak boleh lafadz yang lain. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, demikian pula

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 423.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 52.

murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu, memilih pendapat yang menyatakan akad nikah bisa terjalin dengan lafadz apa saja yang menunjukkan ke sana, tanpa pembatasan harus dengan lafadz tertentu. Bahkan bisa dengan menggunakan bahasa apa saja, selama yang diinginkan dengan lafadz tersebut adalah penetapan akad. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan salah satu perkataan dari mazhab Ahmad. Akad nikah seorang yang bisu tuli bisa dilakukan dengan menuliskan ijab qabul atau dengan isyarat yang dapat dipahami.<sup>44</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat beberapa pendapat berikut ini :

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat akad nikah.

---

<sup>44</sup>Abu Ishaq Muslim, *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al Quran dan As Sunnah*, <http://asysyariah.com>. Html (1 Januari 2015)



Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu seperti terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Adanya wali
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>45</sup>

Syarat pernikahan juga terjadi perbedaan pandangan, misalnya: pendapat dari Muktabah Abu Salmah Al-Atsari yang memberikan penjelasan dari syarat-syarat nikah. Adapun syarat-syarat sahnya nikah ada 4, yaitu:

1. Menyebutkan secara jelas (*ta'yin*) masing-masing kedua mempelai dan tidak cukup hanya mengatakan: “Saya nikahkan kamu dengan anak saya” apabila mempunyai lebih dari satu anak perempuan atau dengan mengatakan: “ Saya nikahkan anak perempuan saya dengan anak laki-laki anda” padahal ada lebih dari satu anak laki-lakinya. *Ta'yin* bisa dilakukan dengan menunjuk

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2003), h. 47.

langsung kepada calon mempelai, atau menyebutkan namanya, atau sifatnya yang dengan sifat itu bisa dibedakan dengan yang lainnya.

2. Kerelaan kedua calon mempelai. Maka tidak sah jika salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah, sebagaimana hadis : “Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”. (HR. Daruqutni).
3. Yang menikahkan mempelai wanita adalah walinya. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka nikahnya tidak sah. Di antara hikmahnya, karena hal itu merupakan penyebab terjadinya perzinahan dan wanita biasanya dangkal dalam berfikir untuk memilih sesuatu yang paling maslahat bagi dirinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tentang masalah pernikahan, ditujukan kepada para wali: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu” (QS. al-Nuur/24:32) “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka” (QS. al-Baqarah/02:232) dan ayat-ayat yang lainnya. Wali bagi wanita adalah: bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu laki-laki dari anak laki-lakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung kemudian seapak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang sama bapak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdekakannya (jika dulu ia seorang budak ) kemudian baru hakim sebagai walinya.

4. Adanya saksi dalam akad nikah, sebagaimana hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Jabir: "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil (baik agamanya)".

Maka tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Imam Tirmidzi berkata: "Itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan para Tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Mereka berkata: "Tidak sah menikah tanpa ada saksi". Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini diantara mereka. Kecuali dari kalangan *ahlu ilmi Muta'akhirin* (belakangan).<sup>46</sup>

Adapun syarat pernikahan menurut Undnag-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 antara lain :

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1)
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).

---

<sup>46</sup>Muktabah Abu Salmah Al-Atsari, Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi, <http://dearto/abusalma.com>. Html (6 Januari 2015).

5. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.

6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.

Persetujuan kedua calon adanya indikasi bahwa pernikahan tidak boleh didasari oleh paksaan. Paling tidak memberikan isyarat wanita sehingga wanita boleh memilih pasangan yang dinilai cocok bagi hidupnya, jadi pernikahan bukanlah sebuah paksaan melainkan sebuah kerelaan.

### 3. Prinsip Pernikahan yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan.

#### a. Prinsip sukarela

Sebagaimana yang tercantum didalam BAB II pasal 6 ayat (1) bahwa: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, baik laki-laki maupun wanita keduanya punya hak untuk memilih pasangan hidup. Suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami isteri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa.

#### b. Prinsip partisipasi keluarga

Pernikahan tidak hanya hubungan antara dua individu tetapi juga mempertimbangkan hubungan keluarga kedua belapihak, keterlibatan pihak keluarga sangat penting. Oleh karena pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang sangat erat berhubungan dengan orang lain khususnya keluarga, sangat mudah dimengerti jika sesuai dengan hukum Islam, undang-undang perkawinan tetap mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktif keluarga dalam pernikahan. Penetapan keharusan ada wali dalam pelaksanaan suatu akad nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan, membuktikan arti penting dari prinsip partisipasi keluarga ini. Demikian pula dengan keharusan ada izin dari wali terutama bagi anak yang belum mencapai usia nikah, disamping keharusan ada saksi dalam setiap penyelenggaraan akad nikah.

#### c. Prinsip mempersulit perceraian

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting, selain itu pernikahan juga memiliki nilai yang sakral. Sehingga persoalan pernikahan tidak boleh hanya dijadikan sebagai sarana hubungan seksual. Maksud dan tujuan asas ini adalah untuk mempersulit penjatuhan talak, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan kuat dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan perceraian.

#### d. Prinsip monogami

Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Selain itu Islam tidak mengenal istilah poliandri atau seorang wanita bersuamikan lebih dari satu. Hukum

Islam termasuk hukum dalam bentuk perundang-undangnya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat yang dimaksud ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan isteri atau isteri-isteri yang telah ada., berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.

e. Prinsip kedewasaan

Pernikahan sangatlah bermamfaat bagi kelangsungan hidup dan perkembangan manusia, tetapi tidak serta merta memberikan kebebasan tanpa ada batasan, salah satu pertimbangan untuk dikategorikan layak menikah adalah jika sudah dewasa, matang dari jasmani maupun rohaninya. Maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan batas umur yang akan melakukan pernikahan.

f. Prinsip Menjaga dan memelihara derajat kaum wanita

Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri haruslah menjadi pertimbangan dalam pernikahan. Maksud dan tujuan dicantumkan nya asas ini adalah untuk memperjelas sekaligus mempertegas hak-hak yang harus diperoleh kaum perempuan (isteri/ ibu) dibalik pencantuman kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki (suami/ ayah).

Berdasarkan analisa di atas, jalinan kerjasama dan keserasian hubungan antara laki-laki (suami/ayah) dengan perempuan (isteri/ibu) dalam mewujudkan keluarga (rumah tangga) sakinah yang dicita-citakan setiap keluarga muslim.

Sebagaimana firman Allah swt QS. an-Nisa/04:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>47</sup>

g. Prinsip legalitas

Asas legalitas pada intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga Negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah negara.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54.

Lebih dari itu, asas legalitas dalam perkawinan seyogyanya tidak dipahami dalam konteks administratif saja, akan tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Dengan penerapan asas legalitas yang lebih maksimal, kemungkinan praktik kawin di bawah tangan (kawin siri) di masyarakat dapat ditekan sedemikian rupa. Sedangkan dari sisi syar'i, asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan ini QS. al-Baqarah/02:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَإِنَّهُ ذَاتُ قَلْبٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>48</sup>

#### h. Prinsip selektivitas

Prinsip selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa seseorang boleh melakukan pernikahan, dan dengan siapa pula dia dilarang (tidak boleh) menikah.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.



Diantara sejumlah larangan pernikahan itu antara lain :

- 1) Larangan perkawinan karena hubungan nasab;
- 2) Larangan perkawinan dengan saudara tertentu yang memiliki hubungan darah terlalu dekat;
- 3) Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
- 4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- 5) Larangan perkawinan terhadap wanita yang pernah *dilian*;
- 6) Larangan perkawinan poliandri;
- 7) Larangan perkawinan dengan bekas isteri yang telah ditalak *ba'in kubra*.
- 8) Larangan poligami yang melebihi empat orang.
- 9) Larangan perkawinan dengan pezina (laki-laki/ perempuan);
- 10) Larangan perkawinan dengan orang musyrik (musyrikah);
- 11) Larangan perkawinan dengan orang yang beda agama.

#### 4. Hak dan kewajiban suami isteri

Dalam kehidupan berumah tangga, setiap suami isteri mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

##### a. Pengertian Hak

Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Misalnya ia hendak mempertahankan haknya. Maka dapat dikatakan bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Jadi yang dimaksud hak disini adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau membayarkannya dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

## b. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke dan akhiran an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Misalnya jangan melalaikan kewajiban.

Bicara tentang kewajiban, semua manusia yang hidup didunia ini tidak terlepas dari padanya, dan setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab. Yang dimaksud disini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami dan isteri.<sup>49</sup>

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan isteri) yang mengandung nilai ibadah Allah swt disatu pihak atau pihak lainnya mengandung aspek kerperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Oleh karena itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan isterinya. Hal itu diatur oleh Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Bab VI Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.<sup>50</sup>

Dalam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Pasal 77 sampai 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

---

<sup>49</sup>Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh Perkawinan* (CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 7-8.

<sup>50</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 13.

### Pasal 77 ayat (1)

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat<sup>51</sup>

Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri diatur oleh Pasal 80 dan 81

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

### Pasal 80 KHI

- (1). Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4). sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5). Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6). Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7). Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>52</sup>

### Pasal 81 KHI

- (1). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

<sup>51</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 132.

<sup>52</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 132 -133.

- (4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>53</sup>

Kewajiban isteri terhadap suaminya terdapat dalam Pasa 34 Undang-Undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

**Pasal 83 KHI**

- (1). Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2). Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 84 KHI**

- (1). Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2). Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3). Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4). Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>54</sup>

Kalau kita kembali kepada hukum syariat untuk menafsirkan makna kewajiban didalam kehidupan suami-isteri, yang terlihat oleh kita adalah kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, yang tidak mampu mencari rizki.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 133.

<sup>54</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 134.

<sup>55</sup> Al-Tahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 65.

Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap isterinya adalah merupakan hak bagi isteri dan begitu sebaliknya. Apa yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya adalah merupakan hak suami.<sup>56</sup>

### C. Perceraian

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.<sup>57</sup>

Al-Jazirah mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>58</sup>

Menurut Abu Zakariah Al-Ansari talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>59</sup>

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj'i.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup>Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh*, h. 7- 8.

<sup>57</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, h. 189.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, h. 192.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, h. 192.

<sup>60</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet 2, Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

Mengikuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka penggunaan hak talak oleh suami hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>61</sup>

Dari alasan-alasan yang ditentukan Pasal 19 ini dapat dipahami bahwa ikatan nikah yang idealnya kekal terjadi diberi peluang terputusnya dengan perceraian. Salah satu bentuk perceraian adalah talak dari suami.

Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut adalah *khul'ul* namanya.

---

<sup>61</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

Unsur pokok yang menentukan bentuk perbuatan hukum ini adalah adanya kesediaan pihak isteri membayar sejumlah harta kepada pihak suami. Bayaran ini disebut *'iwad*.

Putusnya ikatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut dengan kata "Perceraian". Sehingga sama dengan penggunaan hak talak oleh suami, penggunaan hak khulu' oleh isteripun hanya diperkenankan apabila mempunyai alasan seperti yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu.<sup>62</sup>

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah swt adalah talak/perceraian. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah/2: 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum

<sup>62</sup>Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 120 -121.

Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>63</sup>

Firman Allah swt Q.S At-Thalaq/ 65: 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>64</sup>

Firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2: 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا  
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ  
اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ  
بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya*, h. 36.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya*, h. 558.



Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>65</sup>

Hal tersebut merupakan bentuk keadilan dalam Islam mengenai perceraian, bagi suami yang tidak bisa lagi mempertahankan keluarganya sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 229, At-Thalaq ayat 1 dan surah al-Baqarah ayat 231 diatas.

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan fiqh Islam bahwa biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si isteri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si isteri tidak bersalah, maka tinggi yang diperoleh mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam iddah yang kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu, suami tidak perlu membiayai lagi mantan isterinya. Bahkan sesudah masa iddah itu mantan isteri harus keluar dari rumah suaminya andaikata dia hidup dalam rumah yang disediakan oleh suaminya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannyanya*, h. 37.

<sup>66</sup>Idrus Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974, dari segi Hukum Perkawinan Islam* (Cet. 2; Jakarta: 1990), h. 82-83.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>67</sup>

Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah swt yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri.

---

<sup>67</sup>Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 16 – 17.

#### ***D. Kerangka Konseptual***

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasihatian Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.<sup>68</sup>

Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihatian tetapi juga berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas organisasi dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.

Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan.

Di Makassar angka perceraian pasangan suami isteri dari tahun ketahun sangat memprihatinkan. Selama tahun 2014, suami isteri yang bercerai mencapai 2.068 pasangan. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013 sebanyak 1.966 pasangan. Data yang diperoleh di Pengadilan Agama Makassar menyebutkan, dari 2.068 pasangan suami isteri yang bercerai selama 2014, paling banyak

---

<sup>68</sup> Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014, h. 4

disebabkan karena krisis akhlak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan dan alasan ekonomi. Secara rinci disebutkan perceraian yang disebabkan karena krisis akhlak, KDRT akibat minum-minuman keras sebanyak 368 pasangan, tidak ada keharmonisan 402 pasangan, poligami tidak sehat sebanyak 24 pasangan, perselingkuhan atau hadirnya pihak ketiga sebanyak 293 pasangan, faktor ekonomi sebanyak 230 pasangan, kawin paksa setelah itu bercerai 9 pasangan, cacat biologis seperti impoten 1 pasangan dan akibat terjerat hukum sebanyak 2 pasangan, selebihnya masih dalam proses persidangan.<sup>69</sup> Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.



---

<sup>69</sup>Muh. Arsan Fitri, "2.068 Suami Isteri Cerai Selama Tahun 2014". *Harian Berita Kota Makassar*, 31 Desember 2014.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari pandangan para tokoh masyarakat maupun informan yang lain untuk mengetahui bagaimana kinerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis kinerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah di Kecamatan Makassar. Sesuai

dengan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sedangkan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan penelitian tersebut.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Kursus Pra Nikah yang berhasil didapat peneliti. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Macinni
- 2) Kelurahan Macinni Parang
- 3) Kelurahan Macinni Gusung
- 4) Kelurahan Bara-baraya
- 5) Kelurahan Bara-baraya Selatan
- 6) Kelurahan Bara-baraya Utara
- 7) Kelurahan Bara-baraya Timur
- 8) Kelurahan Larian Bangi
- 9) Kelurahan Barana
- 10) Kelurahan Maredekaya

11) Kelurahan Maredekaya Selatan

12) Kelurahan Maredekaya Utara

13) Kelurahan Maricaya

14) Kelurahan Maricaya Barat

Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi tersebut sejauh penilaian peneliti masih ada masyarakat yang menganggap Kursus Pra Nikah tidak terlalu penting. Alasan lain pemilihan Kecamatan tersebut adalah sarana dan prasarana dilokasi penelitian sangat mendukung, tempat penelitian mudah untuk dijangkau sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, dan waktu disamping membantu mempermudah perolehan data.

**Tabel 1.3**

**Data Jumlah Penduduk Kecamatan Makassar**

<b>No</b>	<b>Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kelurahan Macinni	6.980 jiwa
2	Kelurahan Macinni Parang	7.646 jiwa
3	Kelurahan Macinni Gusung	7.557 jiwa
4	Kelurahan Bara-baraya	6.168 jiwa
5	Kelurahan Bara-baraya Selatan	7.104 jiwa
6	Kelurahan Bara-baraya Utara	5.940 jiwa
7	Kelurahan Bara-baraya Timur	8.215 jiwa
8	Kelurahan Larian Bangi	4.596 jiwa
9	Kelurahan Barana	3.774 jiwa
10	Kelurahan Maredekaya	4.572 jiwa
11	Kelurahan Maredekaya Selatan	2.126 jiwa
12	Kelurahan Maredekaya Utara	1.637 jiwa

13	Kelurahan Maricaya	6.356 jiwa
14	Kelurahan Maricaya Baru	7.321 jiwa
<b>JUMLAH</b>		<b>85.116 jiwa</b>

Sumber: Diambil dari data Jumlah Penduduk Kecamatan Makassar, Bulan Januari 2015

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya, normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Karena jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan di BP4 Kecamatan Makassar.

Berangkat dari permasalahan yang muncul di masyarakat, terkait dengan Kursus Pra Nikah, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat serta informan lain yang dianggap penting, terhadap Program Kursus Pra Nikah di Kecamatan Makassar dan bagaimana aplikasinya dalam mengurangi terjadinya perceraian.

Salah satu manfaat Kursus Pra Nikah, adalah untuk meningkatkan pernikahan yang berkualitas.

### ***C. Sumber Data***

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan, yaitu dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar.



2. Data Sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya dari kalangan pakar hukum, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Penelitian Pustaka (*liberary research*)

Yaitu penelitian yang menghimpun data atau informasi dengan membaca dan mencatat sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau pada tempat lain pada sebuah daftar bahan pustaka.

2. Penilitaian lapangan.

Dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fiel research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a) Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang di observasi menurut spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).

b) Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh penggerak pemuda maupun tokoh Pemerintahan di Kecamatan Makassar dengan tujuan untuk menggali opini atau pendapat seseorang terkait pandangan mereka terhadap Kursus Pra Nikah.

c) Dokumen

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

***E. Instrumen Penelitian***

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk obyek penelitian.

Peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dalam hal ini peneliti memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas temuannya.

Dengan demikian, peneliti selain harus memiliki pengetahuan tentang metode penelitian kualitatif, juga harus disertai dengan perlengkapan yang membantu dalam proses penelitian. Adapun perlengkapan yang bisa membantu, bisa berupa buku catatan, alat tulis, kamera, serta *notebook*, yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau para informan, dengan mencatat segala percakapan dengan sumber data.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.***

##### ***1. Teknik Pengolahan***

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal yang utama karena untuk mendapatkan data yang akurat selain itu tanpa teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

Data primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti *interview*. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni calon pengantin yang akan melangsungkan Kursus Pra Nikah. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala BP4, Staf BP4 Kecamatan Makassar, Pemerintah Kelurahan maupun orang tua atau wali dari pelaku Kursus Pra Nikah.

Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan BP4 dalam Kursus Pra Nikah. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam melangsungkan pernikahan atau Penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang mencakup buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah, yang membahas terkait BP4.

## 2. Analisis Data.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan:

### a) Edit (*Editing*)

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari pada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

### b) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam

berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

c) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di teliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang obyektif.

d) Analisis (*Analysing*)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dengan demikian, dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pernikahan di bawah umur.

e) Kesimpulan (*Conclucing*)

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yaitu, pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk

mendapatkan suatu jawaban. Sedangkan Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar adalah salah satu dari 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar tepatnya di Jalan Pelanduk Nomor 38 Kota Makassar, berikut KUA yang ada di Kota Makassar.

**Tabel. 1**

Nama Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Makassar.

NO	NAMA KANTOR	ALAMAT
1	KUA Kec. Biringkanaya	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17, 90241
2	KUA Kec. Bontoala	Jl. Tinumbu Lorong 132 No. 203,
3	<b>KUA Kec. Makassar</b>	Jl. Pelanduk No. 38 Telp. 0411-858667
4	KUA Kec. Mamajang	Jl. Kakak Tua II No. 11
5	KUA Kec. Manggala	Manggala
6	KUA Kec. Mariso	Jl. Baji Minasa I/15 b
7	KUA Kec. Panakkukang	Panakukang
8	KUA Kec. Rappocini	BTN Minasaupa
9	KUA Kec. Tallo	Jl. Teuku Umar No. 11, 90211
10	KUA Kec. Tamalanrea	Tamalarea
11	KUA Kec. Tamalate	Jl. Tala Salapang Gunung Sari
12	KUA Kec. Ujung Pandang	Jl. S. Limboto Lr 52/4
13	KUA Kec. Ujung Tanah	Jl. Sabutung Baru 90161
14	KUA Kec. Wajo	Jl. Barang Lompo No. 33

Sumber: Arsip KUA kecamatan Makassar Tahun 2014

Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mencatat pernikahan dan rujuk saja, tetapi juga pembinaan kehidupan beragama Islam baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah koordinasi Camat sebagai Kepala wilayah.

Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar merupakan Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu. Letak geografis Kecamatan Makassar yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bontoala
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Ujung Pandang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Rappocini
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Makassar, Kota Makassar Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 252 Ha, yang terdiri dari 14 (empat belas) Kelurahan, diantaranya :

- a. Kelurahan Macinni : 0,26 Ha
- b. Kelurahan Macinni Parang : 0,23 Ha
- c. Kelurahan Macinni Gusung : 0,20 Ha
- d. Kelurahan Bara-baraya : 0,16 Ha
- e. Kelurahan Bara-baraya Selatan : 0,14 Ha
- f. Kelurahan Bara-baraya Utara : 0,11 Ha
- g. Kelurahan Bara-baraya Timur : 0,15 Ha
- h. Kelurahan Larian Bangi : 0,20 Ha
- i. Kelurahan Barana : 0,22 Ha
- j. Kelurahan Maredekaya : 0,13 Ha



- k. Kelurahan Maredekaya Selatan : 0,11 Ha
- l. Kelurahan Maredekaya Utara : 0,14 Ha
- m. Kelurahan Maricaya : 0,26 Ha
- n. Kelurahan Maricaya Barat : 0,21 Ha

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Makassar

Adapun tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar sesuai Peraturan Menteri Agama RI No: 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

### a) Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Makassar di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

### b) Fungsi

- 1) Merumuskan visi, misi dan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kecamatan.
- 2) Bimbingan pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam bidang Nikah, Rujuk, Zakat, Wakaf, dan Mesjid.
- 3) Pembinaan keluarga sakinah
- 4) Pembinaan bidang produk halal
- 5) Pembinaan Kemitraan umat Islam
- 6) Pembinaan lembaga dan ibadah sosial

### 3. Susunan Organisasi dan Kepengurusan BP4

Sebagaimana dalam hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2014 Pasal 7 tentang susunan organisasi BP4 sebagai berikut :

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi:
  - a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.
  - b. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus.
  - c. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha.
  - d. Bidang Humas dan Publikasi, dokumentasi.
3. BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.<sup>70</sup>

Sedangkan bagian-bagian kerja lain, seperti bagian Kerja lintas sektoral serta pendidikan dan penerangan tetap di koordinatori oleh ketua BP4 yang merangkap juga sebagai Kepala KUA dengan di bantu oleh staf-staf yang berkecimpung didalam kantor KUA itu sendiri. Dalam hal ini memang Kepala KUA sering merangkap jabatan selain dari Kepala KUA sendiri, diantaranya Ketua BP4, Ketua P2A (Pembinaan dan Pengamalan Ajaran Agama), Ketua BKM, dan Ketua PPAIW.

---

<sup>70</sup> Hasil Munas BP4 Ke XV Tahun 2014

Adapun para staf yang ada dalam Kantor KUA/BP4 Kecamatan Makassar masa jabatan 2010-2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2**

Daftar Staf Pegawai KUA Kecamatan Makassar

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PEND.
1	Drs. Syamsuddin	19591220 198803 1 001	Kepala	S1
2	Shaifullah, S. HI	19670702 198902 2 002	Penghulu	S1
3	Hj. Rosdiana	19600606 198902 2 002	Staf	-
4	Mutmainnah	19610116 199003 2 001	Staf	-
5	Husmiah, S.Ag., MH	19760329 200910 2 004	Staf	S2
6	Novita Indriyati, S.HI	19730622 200910 2 002	Staf	S1
7	H. M. Abbas Hasan, S.Ag	19651231 200701 1 656	Staf	S1
8	Usman Ahmad, S.Ag., M.Ag	19691223 200701 1 015	Penyuluh	S2
9	Drs. Nurhadi, MA	19700312 200701 1 049	Penyuluh	S2
10	Hasnati, SS	19800401 200910 2 001	Penyuluh	S1

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Makassar Tahun 2014

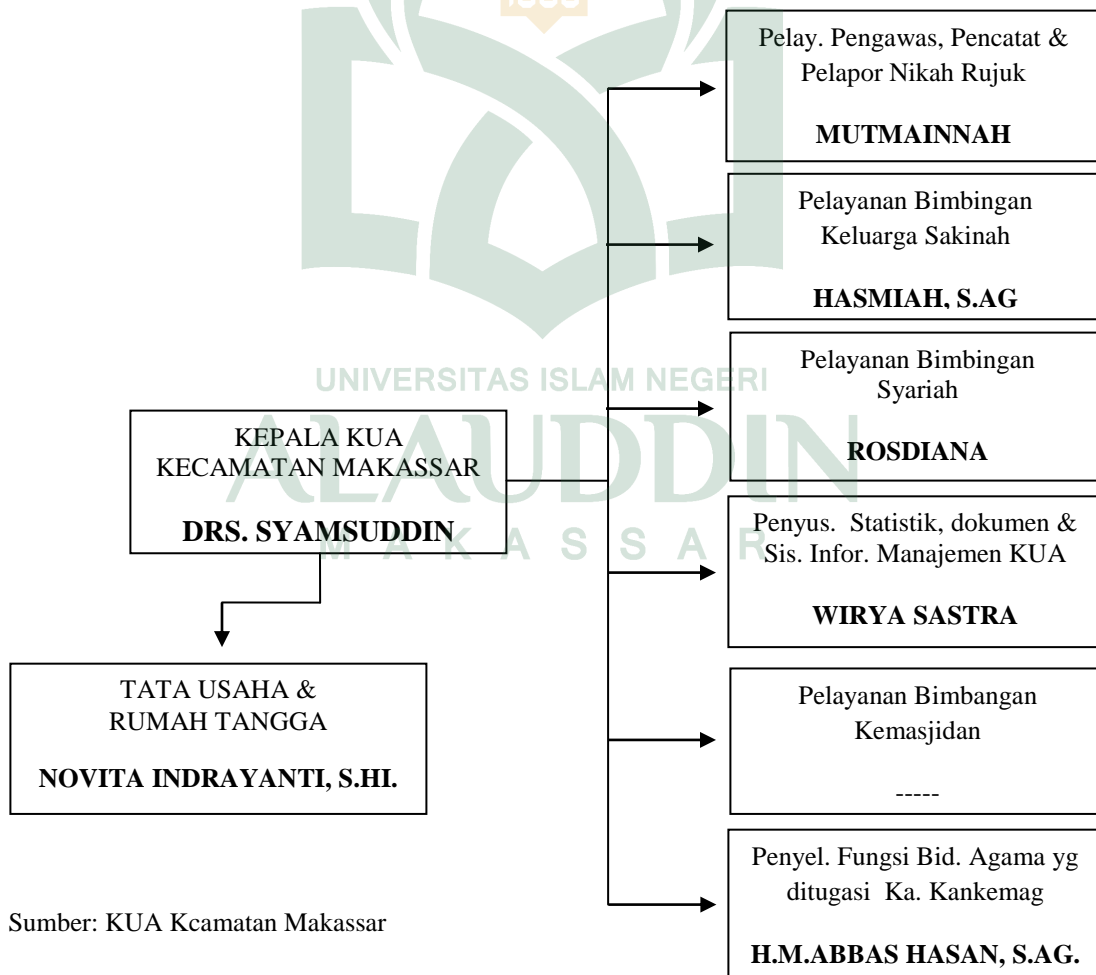
Walaupun dengan keterbatasan, BP4 Kecamatan Makassar tetap terus berupaya yang terbaik untuk perkembangan Kursus Pra Nikah pada khususnya dan BP4 Kecamatan Makassar mempunyai tugas membina keluarga sakinah baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan. Diharapkan efek dari Kursus Pra Nikah itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga mereka. Karena dengan sejahteranya sebuah keluarga akan berimbas pada sejahternya masyarakat itu sendiri.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Abbas Hasan, Pada 5 Januari 2015

Di KUA Kecamatan Makassar sendiri memiliki Staf yang membidangi masalah Kursus Pra Nikah dengan tujuan untuk menjalankan tugas yang ada di KUA. Diharapkan dengan pembagian tugas ini kinerja KUA Kecamatan Makassar bisa lebih baik, karena telah diberikan tugas dan memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya tersebut. Sehingga hasil yang selama ini diharapkan oleh KUA Kecamatan Makassar bisa tercapai dan bisa berefek positif terhadap Masyarakat. Berikut Struktur KUA Kecamatan Makassar.

### Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar



Sumber: KUA Kcamatan Makassar

Dalam kaitan dengan BP4, tentu saja menjadi tugas berat kalau melihat dari jumlah petugas yang ada sekarang dalam mengurangi terjadinya perceraian. Akan tetapi tidak serta merta semangat akan turun, melainkan menjadi sebuah tantangan dalam mewujudkan tujuan dalam mengurangi terjadinya perceraian.

BP4 sebagai lembaga yang mencapai tugas dan tujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, BP4 diharapkan mampu untuk mewujudkan hal itu. Maka BP4 Kecamatan Makassar terus berupaya keras menentukan solusi itu untuk mengatasi masalah ini. Solusi itu kemudian menjadi kerja BP4 terutama dalam hal Kursus Pra Nikah dalam mengurangi terjadinya perceraian.<sup>72</sup> Kerja-kerja yang dilakukan ialah diadakannya Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin dan diadakannya bimbingan keluarga sakinah.

#### 1. Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin

Kursus Pra Nikah bagi calon pengantin memang harus dilaksanakan, mengingat banyak kasus perceraian yang terjadi di usia muda (umur pernikahan), walaupun belum efektif tapi BP4 Kecamatan Makassar terus berupaya untuk bagaimana caranya agar para calon pengantin mau mengikuti program Kursus Pra Nikah di BP4 yang telah diadakan dengan cara memberikan penjelasan dan membujuk kepada calon pengantin bahwa program yang akan dilaksanakan ini merupakan program dari pemerintah yang memiliki tujuan baik untuk kelanggengan rumah tangga calon pengantin. Tujuan program tersebut baik, yakni untuk memberikan bimbingan, wawasan, dan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dan dampak perceraian.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Abbas Hasan, Pada 5 Januari 2015

Yang namanya perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan punya tanggung jawab yang besar dan didalam perkawinan pasti banyak memiliki masalah yang berat maupun kecil, itulah sebabnya kenapa perkawinan disebut “Bahtera” karena selalu diombang-ambingkan oleh ombak dan badai. Bagaimana caranya agar ombak dan badai tersebut tidak membuat bahtera itu tenggelam dari pihak KUA/BP4 sangat berharap bahwa program ini bisa berhasil dan sukses dikemudian hari.<sup>73</sup>

## 2. Bimbingan Keluarga Sakinah

Program Bimbingan Keluarga Sakinah ini adalah program paska nikah (setelah pernikahan), berbeda dengan program Kursus Pra Nikah, keluarga adalah suami-isteri yang terbentuk melalui perkawinan, sedangkan sakinah adalah ketika terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Untuk mewujudkan keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dalam lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Abbas Hasan, Pada 5 Januari 2015

<sup>74</sup> Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Membina keluarga sakinah (Makassar: Kanwil Depag Prov. Sulsel, 2004), h. 5-6.

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga meninggal dunia, agar suami isteri bisa hidup bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, tempat bersemai kasih sayang, dan untuk memelihara dan mendidik anak yang saleh. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami isteri dengan ikatan yang paling suci dan kokok. Istilah ikatan suci dan kokok antara suami isteri oleh al-Qur'an disebut dengan *misaqan galidan*.<sup>75</sup>

Berdasarkan ruang lingkup wilayah tugas BP4 Kecamatan Makassar, memiliki wilayah kerja yang lumayan luas dan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam pun lebih banyak ketimbang pemeluk agama lain dan secara tidak langsung masyarakat yang menjadi tanggung jawab pembinaan BP4 Kecamatan Makassar tersebut lumayan banyak pula, memang lumayan berat juga tugas yang diembah oleh BP4 Kecamatan Makassar tersebut, karena harus merangkul semua masyarakat yang ada di wilayah kerja yang cukup luas itu. Namun BP4 Kecamatan Makassar berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat. Berikut tabel jumlah penduduk di dalam ruang lingkup wilayah kerja BP4 Kecamatan Makassar.

---

<sup>75</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Cet. 1; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 316.

**Tabel. 3**

Jumlah Pemeluk Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar

NO	KELUARAHAAN	ISLAM	KRISTEN PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	JUMLAH
1	Macinni	8.028	250	150	40	58	8.526
2	Macinni Parang	7.113	84	336	20	114	7.667
3	Macinni Gusung	8.258	175	71	-	30	8.534
4	Bara-baraya	5.678	1.766	639	1	3	8.082
5	Bara-baraya Selatan	5.163	1.100	802	6	7	7.078
6	Bara-baraya Utara	3.366	1.628	446	-	-	5.440
7	Bara-baraya Timur	6.531	171	162	4		6.868
8	Larian Bangi	4.437	1.134	999	20	1.131	7.721
9	Barana	7.050	394	524	114	447	8.529
10	Maredekaya	5.678	461	651	16	204	6.364
11	Maredekaya Selatan	1.734	920	524	251	427	3.856
12	Maredekaya Utara	3.017	768	497	21	272	4.575
13	Maricaya	7.458	67	516	19	22	8.082
14	Maricaya Baru	6.028	244	371	104	195	6.942
<b>JUMLAH</b>		<b>78.893</b>	<b>9.162</b>	<b>6.688</b>	<b>616</b>	<b>2.910</b>	<b>98.269</b>

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Makassar Tahun 2014



**Tabel. 4**

Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Makassar Kota Makassar

NO	KELUARAHAAN	MESJID	MUSOLLAH	GEREJA PROTESTAN	WIHARA	PURA	KLENTENG	JUMLAH
1	Macinni	3		2	1			6
2	Macinni Parang	5		1				6
3	Macinni Gusung	4	1	1				6
4	Bara-baraya	2						2
5	Bara-baraya Selatan	3		3				6
6	Bara-baraya Utara	2						2
7	Bara-baraya Timur	3						3
8	Larian Bangi	1	1	4				6
9	Barana	3						3
10	Maredekaya	2		2				4
11	Maredekaya Selatan		1	5			1	7
12	Maredekaya Utara	2		4			1	7
13	Maricaya	2	1	2				5
14	Maricaya Barat	1		1				2
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>65</b>

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Makassar Tahun 2014

Melihat dari data di atas, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk yang memeluk agama Islam jauh lebih banyak ketimbang dengan pemeluk agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Kristen baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan dan lain-lain. Sehingga efektivitas kerja BP4 Kecamatan Makassar sangat besar dalam mengontrol

masyarakat yang memiliki kepentingan di BP4 dan KUA Kecamatan Makassar terutama dalam pembinaan keluarga sakinah melalui Program Kursus Pra Nikah.

Dengan kondisi tersebut BP4 Kecamatan Makassar terus menerus berupaya keras agar program Kursus Pra Nikah bisa lebih diperhatikan oleh masyarakat, karena Kursus Pra Nikah ini sangatlah penting bagi kehidupan berumah tangga di masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa program Kursus Pra Nikah ini tidaklah penting, karena di dalam masyarakat pun sudah diajarkan tentang bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, baik di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), MI (Madrasah Ibtidaiyah), sampai pesantren daerah yang ada diwilayah kerja BP4 Kecamatan Makassar. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan, Pelestarian dan Perceraian.

***B. Upaya Badan Pnasehatan Pembinaan dan Pelestaraan Pernikahan (BP4) dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar***

Usaha dan upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk mencapai tujuan yaitu mengrunji terjadinya perceraian, sebagaimana dalam Anggaran Dasar BP4 Bab III Pasal 6 tentang upaya dan usaha, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;

2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
5. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat ;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;

12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>76</sup>

Dari beberapa upaya dan usaha BP4 diatas, ada kontribusi yang khusus atau paling utama dan terus dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Makassar, diantaranya:

1. Program Kursus Pra Nikah melakukan atau mengadakan pentaran atau lebih kita kenal dengan istilah SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) yang di khususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan ini wajib di ikuti oleh mereka. Materi yang disampaikan terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b. Fiqih Munakahat;
  - c. Fiqih Ibadah dan muamalah;
  - d. Program Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan;
  - e. Pembinaan dan Pendidikan Keluarga sakinah, dan
  - f. Materi yang berkaitan dan dianggap perlu.
2. Program Kursus Pra Nikah, BP4 melakukan atau mengadakan kegiatan sosialisasi kemasyarakat tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya, melaui seminar-seminar, ceramah, khotbah jum'at serta menyelenggarakan konsultasi hukum, penasehatan perkawinan dan keluarga bagi pasangan suami isteri yang sedang dalam konflik rumah tangga dan kepada masyarakat luas.

---

<sup>76</sup> Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014, h. 5.

Keberadaan BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Makassar ditengah-tengah masyarakat, sangat membantu dalam menangani hal-hal yang dianggap penting, terutama dalam hal permasalahan dan perselisihan perkawinan, baik berupa penasehatan, pembinaan, serta pelestarian perkawinan. Sehingga dengan adanya BP4 di msyarakat akan dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang diidam-idamkan oleh seluruh keluarga yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Setelah mengadakan wawancara kepada para pihak yang terkait mengenai masalah efektif atau tidaknya, tentang Kinerja BP4 KUA Kecamatan Makassar dalam Menjalankan tugasnya dalm membentuk keluarga sakinah, penulis menemukan jawaban serta pandangan yang beragam. Menurut pendapat Bapak Drs. Syamsuddin (Kepala KUA) beserta para pegawai KUA yang lain mempunyai kesamaan pendapat. Bahwa kinerja BP4 Kecamatan Makassar dalam Kursus Pra Nikah cukup efektif.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa BP4 adalah lembaga yang menangani masalah perkawinan, dan dalam BP4 itu sendiri memiliki program Kursus Pra Nikah, Kursus Pra Nikah merupakan salah satu program yang dimiliki oleh BP4 dalam menangani masalah perkawinan, khususnya dalam mengurnagi terjadinya perceraian.

Hal itu pun sudah ditegaskan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas kementerian agama dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah dan perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan perceraian, bahwa tugas sebuah lembaga BP4 itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Dalam hal ini BP4 melahirkan program Kursus Pra Nikah. Tujuan adanya program

Kursus Pra Nikah itu adalah untuk menciptakan dan menjaga keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sesuai tuntunan Allah swt. walaupun Negara menggunakan hukum barat bukan hukum Islam, akan tetapi dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam bahkan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, mau tidak mau harus ada yang mengurus masalah pribadi umat Islam di Indonesia, contohnya dalam masalah pernikahan. Sudah terbentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mengatur hubungan antara pemeluk agama Islam di Indonesia.

Membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak semata-mata lahir dari sendiri, akan tetapi perlu juga sesuatu yang membantu kita untuk dapat membentuk keluarga yang diharapkan, baik itu lembaga, badan atau semacamnya.

Kementerian Agama dibentuk di Indonesia oleh pemerintah menjelang usia lima bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Tugas pokok Kementrian Agama sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama yang pertama yaitu Bapak H. M. Rasyidin sebagai berikut: “ Pemerintah RI mengadakan kementerian agama sendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29 yang berbunyi: Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Tugas Kementrian Agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tersebut diatas adalah: “Hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan

kata lain bahwa Kemetrian Agama (Departemen Agama) tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan mencari pemecahannya terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga”.

BP4 sebagai badan yang memutuskan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat keadaan yang seperti ini, maka keluarga akan merasakan akibatnya. Sebab pergeseran nilai dari pada norma-norma itu lebih terlihat dalam kehidupan para remaja atau generasi muda pada khususnya. Apabila orang tua kurang menyadari gejala ini dan tidak berusaha menyelami kehidupan para remaja atau anak-anaknya, maka pergeseran ini bisa menjadi perbenturan nilai yang mewujudkan apa yang disebut “*generation gap*” . dan dalam keadaan seperti ini, secara eksistensi keluarga menghadapi bencana.

Selain fakta-fakta yang terjadi diatas, kemudian antara tahun 1950 sampai 1954 dilakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak dan rujuk (NTR) seluruh Indonesia ditemukan pula fakta-fakta menunjukan labilnya perkawinan Indonesia. Dari data statistik pernikahan seluruh Indonesia, angka cerai dan talak mencapai 60% sampai 70% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari), bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu. Hal tersebut mendorong H.S.M Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasihat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami isteri. Maka pada Bulan April 1954 di setiap KUA se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasihat Perkawinan).

Denagan membentuk SPP (Seksi Penasihat Perkawinan) pada kantor-kantor Urusan Agama se-Jakarta Raya mulai April 1954, yang kemudian pada tahun 1956

menjelma menjadi P5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian, mempertinggi nilai perkawinan dengan memberikan nasihat bagi mereka yang mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya. Usaha P5 ini mendapat sambutan luas dari masyarakat dan pemerintah (Departemen Agama) sehingga kemudian meluas ke Jawa Timur, Kalimantan, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Bersamaan dengan itu pada tahun yang sama, tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung didirikan suatu badan usaha badan yang sejenis, dengan nama BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), organisasi ini didirikan atas prakarsa Bapak Abdur Rauf Hamidy atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Pak Arhata”, yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Depertamen Agama Propinsi Jawa Barat yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat. Pada saat itu, BP4 cepat berkembang di Jawa Barat, bahkan meluas ke Jawa Tengah pada Tahun 1957, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerakan yang serupa dengan mendirikan organisasi sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga).

Ketiga organisasi diatas berjalan dengan tujuan yang serupa yaitu “menyelamatkan setiap rumah tangga dari keruntuhan sambil menunggu lahirnya Undang-Undang perkawinan yang diharapkan akan mengatur perkawinan menjadi lebih stabil serta menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal.

Sehingga sampai waktunya, pada tanggal 3 januari 1960, disepakati gagasan peleburan organisai-organisai penasihat perkawianan yang bersifat lokal itu menjadi badan tingkat nasional yang diberi nama Badan Penasihatank Perkawinan dan



Penyelesaian Perceraian atau disingkat BP4. Hal tersebut adalah merupakan musyawarah wakil-wakil ketiga organisasi tersebut pada tanggal 3 Januari 1960.

BP4 dengan sejarahnya yang panjang, akhirnya BP4 mendapat pengakuan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Kementrian Agama dalam bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian. Dalam BP4 itu mempunyai program Kursus Pra Nikah yang diperuntukkan untuk para calon pengantin dan anak yang sudah masuk usia nikah, yang bertujuan memberikan bimbingan dan pengetahuan tentang bagaimana menciptakan keluarga bahagia yang diidamkan oleh semua orang.

Kursus Pra Nikah merupakan pintu gerbang seluruh bahtera pernikahan, dengan adanya Kursus Pra Nikah diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan yang lebih dalam dan luas mengenai segala biduk masalah rumah tangga agar tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pola pemikiran yang berbeda dari setiap pasangan calon pengantin perlu disejajarkan atau disamakan melalui kegiatan Kursus Pra Nikah ini. Dengan mengikuti kegiatan kegiatan Kursus pra Nikah ini diharapkan dua individu yang memiliki watak dan pola pemikiran berbeda bisa disatukan sehingga mereka akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sesungguhnya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau mereka tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah yang BP4 Kecamatan Makassar adakan, karena manfaatnya sangat besar untuk kehidupan rumah tangga mereka kelak.

Melihat pentingnya kegiatan Kursus Pra Nikah, maka dari Kursus Pra Nikah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, adapun upaya-upaya BP4 Kecamatan

Makassar Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas

- a. Meningkatkan kualitas narasumber atau konsultan perkawinan didalam Kursus Pra Nikah tersebut, sehingga dengan semakin baik kualitas narasumber atau konsultan, maka akan semakin baik pula kualitas Kursus Pra Nikah itu sendiri. Dengan mengirim narasumber-narasumber yang ada di BP4 Kecamatan Makassar ke pelatihan yang diadakan oleh Kementrian Agama Kota Makassar. Diharapkan dengan meningkatkan narasumber bisa semakin baik pula kualitas bimbingan terhadap calon pengantin maupun orang yang sdah masuk usia nikah sehingga pengurangan terjadinya perceraian bisa tercapai.
- b. Mempertajam materi-materi yang diberikan kepada calon pengantin, yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga sesuai dengan kondisi sekarang ini. Materi-materi tersebut diselingi dengan informasi menangani hadhanah dan waris, akan tetapi informasi itu diberikan dengan kesan negatif supaya calon pengantin ini tidak ada rencana untuk bercerai dan memperebutkan hak asuh anak atau warisan. Dengan kata lain calon pengantin akan berusaha keras mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan apapun. Diharapkan dengan lebih mempertajam materi-materi, masyarakat bisa lebih paham akan tujuan dari pemberian materi tersebut, dan dengan cepat dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perceraian dapat dicegah sidini mungkin.

2. Kuantitas

- a. Memberikan reward atau penghargaan bagi yang mengikuti program Kursus Pra Nikah. Dengan adanya pemberian reward ini, masyarakat lebih semangat dalam mengikuti program Kursus Pra Nikah, sehingga tujuan untuk mengurangi terjadinya perceraian bisa terwujud.
- b. Mempersiapkan calon keluarga sakinah untuk diikutsertakan pada pemilihan keluarga sakinah tingkat Kota Makassar.

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan minat dan wawasan masyarakat tentang pentingnya program Kursus Pra Nikah karena tujuan diadakannya program Kursus Pra Nikah itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dunia rumah tangga, pahit manisnya rumah tangga, cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga, sehingga bisa tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Tujuan lain dari kursus Pra Nikah ini adalah untuk mengurangi terjadinya perceraian.

***C. Faktor pendukung maupun penghambat bagi BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian di Kecamatan Makassar***

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP4 dipastikan menemui faktor-faktor pendukung dan juga beberapa faktor penghambat (kendala atau hambatan). Diantara faktir-faktor pendudukan yaitu:<sup>77</sup>

1. Besarnya harapan dan pendukung masyarakat terhadap program Kursus Pra Nikah;
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan intansi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Makassar Januari 2015

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam;

3. Terbentuknya hubungan kerjasama yang sinergi, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama;
4. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4.
5. Dukunagn kuat dari Kementrian Agama sebagai mitra kerja BP4 dan instansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.

Disamping faktor diatas ada pula beberapa faktor penghambat (hambatan atau kendala) lainnya, diantaranya yaitu:

1. Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas;
2. Belum optimalnya tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
3. Kemampuan menejerial pengurus BP4 yang belum memadai;
4. Perkembangan globlisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan agama;
5. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk opersional BP4;
6. Masih adanya sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Makassar yang kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi dan peran BP4 itu yang sebenarnya, sehingga sangatlah sedikit serta kurangnya masyarakat untuk

menggunakan jasa BP4 di wilayah Kecamatan Makassar secara semaksimal mungkin, karena masih menganggap BP4 itu sangatlah identik dengan KUA.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan pemaparan penulis tentang peran BP4 Kecamatan Makassar terhadap efektivitas kerja BP4 terhadap Kursus Pra Nikah dalam mengurangi terjadinya perceraian. Penulis menganalisis bahwa peran BP4 Kecamatan Makassar dalam program Kursus Pra Nikahnya sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian. BP4 Kecamatan Makassar selalu terus menerus berupaya untuk melakukan suatu kegiatan yang bersifat pro aktif dalam mengurangi terjadinya suatu perceraian. Karena BP4 adalah sebagai salah satu badan swasta yang bertugas membantu kegiatan pemerintah, dalam hal Kementrian Agama yang eksistensinya dikukuhkan KMA No. 85 Tahun 1961 Jo, KMA. No. 30 Tahun 1997. BP4 Kecamatan Makassar juga mempunyai fungsi yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga, BP4 melalui program Kursus Pra Nikahnya, juga berperan serta dalam mengurangi terjadinya perceraian.

BP4 Kecamatan Makassar memang cukup berperan penting dalam mengurangi terjadinya perceraian, terutama perceraian di wilayah yuridiksi BP4 Kecamatan Makassar, walaupun masih saja terjadi perceraian, paling tidak BP4 bisa menekan angka perceraian itu. BP4 Kecamatan Makassar selalu berinovasi untuk mencari solusi guna mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat.

BP4 Kecamatan Makassar ini selalu berupaya serius dalam mengurangi terjadinya perceraian, salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah, karena Kursus Pra Nikah ini adalah salah satu bentuk

upaya BP4 Kecamatan Makassar dalam mengurangi terjadinya perceraian sesuai dengan tujuannya. Dengan meningkatkan kualitasnya dari sisi narasumbernya atau konsultan perkawinannya, dan bukan hanya kualitasnya, kuantitasnya terus ditingkatkan seperti berinovasi dengan metode dan teknik pelaksanaannya, dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan memberikan reward atau penghargaan bagi yang mengikuti program Kursus Pra Nikah ini bisa berdampak meningkatnya pula kualitas hidup rumah tangga masyarakat.

Dalam kegiatan Kursus Pra nikah yang ada di BP4 untuk calon pengantin. BP4 berharap agar kegiatan yang dilakukan BP4 ini bisa mengurangi tingkat perceraian. Karena disinilah perannya BP4 dalam kegiatan Kursus Pra Nikah ini untuk memberikan pembekalan buat mereka kedua calon pengantin untuk berumah tangga. Mereka semua yang mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah diberikan pembekalan oleh konsultan perkawinan seputar masalah hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan seperti:

1. Tujuan perkawina
2. Tugas, hak, dan kewajiban Suami Istri
3. Kiat-kiat rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah
4. Kiat-kiat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga

Dalam pembekalan yang telah diberikan oleh konsultan BP4 Kecamatan Makassar ini dalam kegiatan Kursus Pra Nikah, diharapkan bisa menjadi bermanfaat untuk calon pengantin nantinya dalam rumah tangga. Peran BP4 Kecamatan Makassar seperti itu setidaknya bisa mengurangi terjadinya perceraian karena program Kursus Pra Nikah itu tidak hanya untuk calon pengantin, tapi juga untuk anak yang sudah masuk usia nikah. Diharapkan bagi anak yang sudah masuk usia

nikah bisa mendapatkan ilmu dan wawasan lebih dini tentang pentingnya mempertahankan tali perkawinan.

Menurut analisis dari penulis, BP4 Kecamatan Makassar memiliki kekurangan, yakni masalah jumlah konselornya terbatas, sehingga tidak memungkinkan mengadakan program Kursus Pra Nikah dalam jumlah yang besar. Saran dari penulis dalam masalah ini adalah dengan merekrut konselor baru, sehingga semakin banyak konselor yang berkualitas di BP4 Kecamatan Makassar.

Tidak hanya kekurangan dari sisi sumber daya manusianya, BP4 Kecamatan Makassar Kota Makassar juga memiliki kekurangan pada fasilitasnya, yakni tidak memiliki tempat khusus untuk kegiatan Kursus Pra Nikah, sehingga program ini terganggu dan tidak berjalan dengan baik karena tempat yang seharusnya ada khusus untuk kegiatan Kursus Pra Nikah oleh BP4 Kecamatan Makassar tidak menyediakan tempat tersebut dikarenakan gedung dan lahan yang terbatas. Menurut penulis jalan keluar dari masalah ini adalah dengan memanfaatkan kantor KUA Makassar sebagai tempat diadakannya Kursus Pra Nikah, karena untuk kegiatan semacam itu tidak harus memaksakan diri menggunakan ruangan pribadi, walaupun tidak memungkinkan menggunakan ruangan pribadi, walaupun tidak memungkinkan menggunakan ruangan pribadi karena faktor gedung dan lahan yang terbatas bisa memanfaatkan Kantor KUA Makassar itu sebagai tempat diadakannya Kursus Pra Nikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan Penelitian***

Dari analisa yang telah dijelaskan penulis, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam mengurangi terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar yaitu:
  - a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatn, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
  - b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
  - c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
  - d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
  - e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat ;
  - f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;



- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;
  - h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
  - i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
  - j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
  - k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
  - l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga
2. Faktor penghambat dan pendukung BP4 dalam mengurangi perceraian di kecamatan Makassar sebagai berikut:
- a. Faktor Penghambat
    1. Posisi atau status BP4 terkait dengan bantuan APBN dan APBD belum jelas;
    2. Belum optimalnya tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
    3. Kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai;
    4. Perkembangan globalisasi serta meningkatnya pengaruh teknologi informasi yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dan

keluarga seperti meluasnya gaya hidup hedonistik, materialistik, dan konsumerisme yang bertentangan dengan agama;

5. Minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4;
6. Masih adanya sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Makassar yang kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi dan peran BP4 itu yang sebenarnya, sehingga sangatlah sedikit serta kurangnya masyarakat untuk menggunakan jasa BP4 di wilayah Kecamatan Makassar secara semaksimal mungkin, karena masih menganggap BP4 itu sangatlah identik dengan KUA.

b. Faktor Pendukung

1. Besarnya harapan dan pendukung masyarakat terhadap program Kursus Pra Nikah;
2. Kuatnya dukungan dari instansi pemerintah terhadap lembaga BP4 dalam mewujudkan inti keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam;
3. Terbentuknya hubungan kerjasama yang sinergi, dengan berbagai organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama;
4. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung organisasi BP4.

5. Dukunagn kuat dari Kementrian Agama sebagai mitra kerja BP4 dan instansi terkait dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Setelah penulis melakukan pengamatan dan pelitian secara langsung serta telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan. Maka harapan penulis untuk kemajuan dan perkembangan BP4 Kecamatan Makassar ini antara lain sebagai berikut:

1. BP4 Kecamatan Makassar agar lebih meningkatkan penyuluhan penyuluhan tentang keluarga sakinah terhadap masyarakat.
2. Sosialisasi BP4 baik secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui media cetak dan elektronik tentang program Kursus Pra Nikah di masyarakat perlu di tingkatkan lagi. Sehingga masyarakat bisa lebih tahu dan memahami apa tujuan dari program Kursus Pra Nikah itu sendiri.
3. Perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam masalah bimbingan, dengan menambahkan waktu bimbingan dan penambahan materi seperti waris dan hadhanah, sehingga masyarakat dapat terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan oleh BP4 Kecamatan Makassar tersebut.
4. Perlu adanya sanksi, yaitu dengan ditundanya akad nikah atau bahkan dibatakannya akad nikah apabila masyarakat tidak mau mengikuti program Kursus Pra Nikah. Sehingga Kursus Pra Nikah tidak dipandang sebelah mata lagi oleh masyarakat.
5. Untuk masyarakat sendiri harus bisa menyempatkan waktu untuk dapat mengikuti program Kursus Pra Nikah, dan kepada calon pengantin serta

orang yang sudah masuk usia nikah bisa menerapkan ilmu yang didapat dari program Kursus Pra Nikah tersebut.

6. Agar fungsi dan peran BP4 lebih ditingkatkan dalam membina keluarga, agar dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dunia akhirat.

Demikianlah secara ringkas kesimpulan pembahasan penyusun dalam skripsi ini, Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua khususnya terhadap Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Makassar untuk terus menyempurnakan peran dan fungsinya yang telah dijalankan. Semoga Allah swt Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga bisa berjalan di muka bumi ini dengan berlandaskan Syari'at yang Islami. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Prasindo, 2010.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *fiqih munakahat I*, Cet.1; Bandung: CV. Pustaka setia, 1999.
- Al-Hadad, Al-Tahir. *Wanita dalm Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arif Harsanto, Mayzan. “Peran Penasehatan BP4 dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Purbayan Kotagede’ Yogyakarta Tahun 2007-2009)”, Skripsi, Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Daradjat, Zakiah, “*Ilmu Fiqih*,” dalam Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqih Munakahat*”, Cet.3; Jakarta : Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djaelani, Abdul Qadir *Keluarga Sakinah*, Cet. 1; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Faskh Perkawinan*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Fitri, Muh. Arsan, “2.068 Suami Isteri Cerai Selama Tahun 2014”. *Harian Berita Kota Makassar*, 31 Desember 2014.
- Ghazali, Abd. Rahman *Fiqih Munakahat*, Cet 2; Bogor: Kencana, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Munakahat*, Cet. 3; Jakarta : Kencana, 2003.
- Hasanuddin, *Perkawinan dalam Prespektif Al-Qur’an “Nikah, Talak, Cerai, Rujuk”*, Jakarta: Nusantara Damai Perss, 2011.
- Hasil MUNAS BP4 Ke XV/2014 Jakarta, 15 – 16 Agustus 2014.
- Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Makassar Januari 2015
- Idrus Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 tahun 1974, dari segi Hukum Perkawinan Islam* (Cet.2, Jakarta: 1990.
- Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Membina keluarga sakinah Makassar: Kanwil Depag Prov. Sulsel, 2004
- Kuzari, Achmad. *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2006.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Mazhab*, Pondok Indah: ICIP, 2005.
- Muhammad Azzam, Abdul Azis dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitab, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 44-48.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan, 1994.
- Muktabah Abu Salmah Al-Atsari, Bekal-bekal pernikahan menurut sunnah Nabi, <http://dearto/abusalma.com>. Html 6 Januari 2015.
- Muslim, Abu Ishaq. *Indahnya Pernikahan Islami Membentuk Keluarga Bahagia di Atas Al Quran dan As Sunnah*, <http://asysyariah.com>. Html 1 Januari 2015.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Peraturan Mentri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan Perkawinan bagi yang bergama Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Republik Indonesia, Undang-Undang. No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I. Cet. Ke 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soedharyo, Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sujiantoko, “*Peran Dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*”, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010.
- Syarifuddin, “*Peran dan Kontribusi BP4 dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*”, Skripsi, Jakarta : Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Wawancara dengan Bapak Abbas Hasan, Pada 5 Januari 2015



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keterangan Wawancara
2. Surat Pengantar Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
3. Surat Izin/Rekomendasi penelitian dari Badan Koordinator Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar
5. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Camat Kecamatan Makassar
6. Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar Kota Makassar
7. Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi





## RIWAYAT HIDUP



**BISMAN**, lahir pada tanggal 10 November 1992, di Simbuang II, Mamuju , Sulawesi Barat. Anak ke 3, buah kasih sayang dari pasangan Abd. Galib Hamid dan ST. Amina Azis. Bersama dengan saudara-saudari saya yang tercinta :Abd. Malik, Rini Ihdina, Gairah Susmita, Nina Lisna, Basman, Hikmah Dina dan Abd. Gafur.

Penulis pertamakali mengenyam pendidikan di SDN Inpres Salupangi Mamuju lulus tahun 2005, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Binanga Mamuju lulus tahun 2008, penulis melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju dan lulus Tahun 2011. Ditahun yang sma melalui SBMPTN tertulis penulis lulus masuk Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum. Semasa kuliah penulis juga aktif dibeberapa organisasi kemahasiswaan, diantaranya Ikata Alumni Madrasah Aliyah Negeri (IKAMAN) Mamuju Cabang Makassar, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Peradilan Agama dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.